

POLA KOLONISASI PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA DI LAMPUNG DAN MAPILI (1905 – 1942)

Fadhila Husna Asri

Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang berlangsungnya program transmigrasi pada tahun 1905 – 1942. Kebijakan transmigrasi yang dijalankan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dikenal dengan istilah kolonisasi. Menurut pengumuman-pengumuman Pemerintah Hindia Belanda, tujuan dari kolonisasi yang akan diselenggarakan ini ialah untuk mengurangi kepadatan dan kelebihan penduduk pulau Jawa. Daerah Lampung di Pulau Sumatra dan Mapili di Pulau Sulawesi dipilih menjadi daerah kolonisasi yang mapan. Kolonisasi di Lampung berjalan dalam tiga periode yaitu fase percobaan pada tahun 1905-1911, periode Bank Kredit Lampung pada tahun 1911-1930, Periode Pasca Depresi Ekonomi pada tahun 1930-1941. Kolonisasi Mapili dilaksanakan dalam empat gelombang keberangkatan sejak tahun 1937 hingga tahun. Program kolonisasi pada kedua daerah berbasis pada sektor agraris dan menitik beratkan peranan sentral Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Perbandingan program kolonisasi bagi kedua daerah tersebut terletak pada aspek anggaran pembiayaan yang diberikan. Hal ini dikarenakan kolonisasi di dua daerah tersebut merupakan hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya.

Kata Kunci: *Kolonisasi, Lampung, Mapili*

PENDAHULUAN

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda selama menjalankan praktik kolonial di Hindia Belanda telah memberlakukan berbagai kebijakan terkait dengan demografi atau kependudukan. Salah satu program penting pemerintah kolonial Hindia Belanda di bidang kependudukan tersebut adalah transmigrasi. Transmigrasi sendiri merupakan bagian dari kebijakan demografi dalam menjalankan misi pemerataan penduduk dan menghindari ledakan penduduk di suatu wilayah. Transmigrasi secara umum dapat dimaknai sebagai mobilisasi penduduk dari daerah yang padat penduduknya menuju daerah yang jarang penduduknya. Berdasarkan pada pengertian transmigrasi tersebut dapat diperkirakan alasan dijalankannya transmigrasi oleh pemerintah kolonial merupakan jawaban atas permasalahan kepadatan penduduk yang ada di Hindia Belanda. Tentu saja hal ini perlu dibuktikan lebih jauh dengan meninjau proses

berjalannya kebijakan transmigrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda program transmigrasi lebih dikenal dengan terminologi kolonisasi. Kolonisasi atau transmigrasi merupakan bentuk Politik Balas Budi yaitu menyelenggarakan emigrasi. Menyelenggarakan emigrasi menjadi bagian dari Trilogi Deventer yang diimplementasikan pemerintah kolonial Belanda melalui Pelaksanaan Politik Etis. Antara Emigrasi dan transmigrasi memiliki keterkaitan satu sama lain. Emigrasi merupakan bentuk mobilisasi penduduk yang keluar dari suatu daerah, wilayah atau negara. Salah satu bentuk paling umum dari emigrasi yang menjadi program penting pemerintah Kolonial adalah kolonisasi.

Pada tahun 1915 program kolonisasi sebagai bagian dari politik etis resmi dimulai. Kolonisasi dijalankan dengan menitikberatkan kepentingan politik pemerintah kolonial Belanda di tanah jajahannya. Selama kurang lebih 27 tahun kolonisasi yang dilaksanakan pada akhir masa penjajahan Belanda (1915-1942) selalu ada celah untuk meraup keuntungan. Kolonisasi pada implementasinya banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja atau kuli perkebunan swasta pada masa diterapkannya politik liberal di Hindia Belanda. Penduduk Jawa yang bermigrasi ke Sumatra kini diarahkan untuk menjadi kuli kontrak dengan upah yang murah di perkebunan Sumatra seperti perkebunan tembakau di Deli. Pada periode 1927-1930 menunjukkan indikasi perbedaan kebijakan pembiayaan transmigrasi. Selama ini pemahaman tentang kolonisasi lebih banyak difokuskan pada program yang terpusat di Lampung saja. Pada faktanya Pemerintah Kolonial juga mencanangkan program kolonisasi ke pulau Sulawesi tepatnya di wilayah Mapili.

Dua wilayah tujuan kolonisasi yang terpisah cukup jauh secara geografis ini menarik untuk dikaji dalam rangka mengetahui perbedaan serta persamaan pola, latar belakang dan motif kolonisasi yang dijalankan dalam dua daerah tersebut. Berangkat dari permasalahan ini maka penelitian ini akan mengulas lebih jauh mengenai perbandingan kolonisasi yang dijalankan di Lampung dan Mapili melalui penelusuran data dan dokumen sejarah yang menggambarkan jalannya kolonisasi tersebut.

LANDASAN TEORI

Studi sejarah dengan penjabaran kualitatif memerlukan tinjauan pustaka untuk melengkapi kajiannya. Dalam penelitian ini digunakan berbagai literasi yang memuat topik penelitian sejarah yang dikaji. *Pertama*, buku *Transmigration in Indonesia* (Transmirasi dari Kolonisasi sampai Swakarsa) karya JM Harjono menguraikan tentang pelaksanaan kolonisasi masa Pemerintah Kolonial Belanda. Informasi penting yang termuat dalam buku ini adalah tentang berlangsungnya kolonisasi di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya informasi ini akan digunakan sebagai data penelitian untuk membandingkan pola kolonisasi di dua daerah tersebut.

Tinjauan pustaka yang *kedua* adalah buku karya Swasono berjudul *Transmigrasi di Indonesia: 1905-1985*. Buku ini menguraikan lebih detail tentang berlangsungnya program transmigrasi sejak dilaksanakannya politik etis hingga masa akhir penjajahan Hindia Belanda. Kedua buku ini menjadi rujukan dan tinjauan pustaka utama penelitian dan penulisan sejarah ini disamping berbagai literasi tambahan yang tidak dapat disebutkan.

Penelitian sejarah disamping terikat dengan sumber sejarah juga terikat dengan historiografi sebelumnya terkait topik sejarah yang diteliti. Dalam topik penelitian tentang pola kolonisasi masa Pemerintah Kolonial Belanda, historiografi yang relevan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amir yang berjudul *Wonomulyo: Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1937-1952*. Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada lingkup wilayah Wonomulyo dengan membandingkan antara pelaksanaan kolonisasi sebagai program Pemerintah Kolonial Belanda dengan transmigrasi sebagai program pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka. Oleh sebab itu berangkat dari hal tersebut dikembangkan penelitian baru dengan fokus penelitian pada analisis perbedaan pola kolonisasi di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan selama masa pemerintahan Kolonial Belanda.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif lebih umum dikenal dalam studi ilmu-ilmu sosial.. Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong (2006) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif cocok

untuk mengkaji masalah sosial humaniora karena memiliki karakteristik memandang perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri, menekankan pada validasi data dunia empiris, bersifat humanistik, dan semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga. Penjabaran hasil penelitian berdasarkan analisis data kualitatif lebih umum digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian sejarah kolonisasi ini.

Historiografi lainnya yang telah menyinggung tentang program kolonisasi adalah dari penelitian M. Halwi Dahlan berjudul *Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonisasi, Kokumingsakari, dan Transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979)*. Penelitian sejarah yang kedua ini mencakup hal yang cukup luas dalam hal periodisasi. Oleh sebab itu dalam penelitian tentang pola kolonisasi ini akan difokuskan pada pembahasan pelaksanaan kolonisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1915-1942 dengan menekankan pada analisis perbandingan pola, permasalahan dan tingkat keberhasilan di dua wilayah berbeda.

Metode penelitian sejarah menggunakan metode khusus yang dikenal dengan metode sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan metode sejarah adalah seperangkat azas dan kaidah yang sistematis yang diubah untuk membantu secara efektif mengumpulkan sumber – sumber, menilainya secara kritis dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.¹ Metode sejarah merupakan langkah penelitian sejarah. Kuntowijoyo berpendapat bahwa terdapat beberapa langkah penelitian sejarah yang dikenal umum yaitu 1) Pemilihan topik; 2) Heuristik; 3) Verifikasi atau Kritik Sumber; 4) Interpretasi dan 5) Historiografi.

Pada tahap pengumpulan sumber didapatkan berbagai arsip dokumen dan foto yang relevan dalam penelitian ini. Arsip dokumen dan foto tersebut telah lolos proses verifikasi sumber baik dalam bentuk kritik eksternal dan internal. Kritik Internal dilakukan untuk menilai kalayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan peristiwa sejarah yang meliputi kompetensi, kedekatan atau kehadiran sumber dalam peristiwa sejarah. Selanjutnya kritik eksternal merupakan kritik yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber sejarah.² Pengecekan tanggal penerbitan dan

¹ Garraghan, G. J. *A Guide to Historical Methode*. (New York: Fordham University Press. 1957).

² Dien Madjid dan Djohan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. (Depok: Pranamedia Group, 2014) hlm. 224.

pengecekan forensi dokumen merupakan bentuk kritik eksternal yang umum dilakukan terhadap sumber dokumen. Sumber arsip dokumen dan foto yang dimaksud terlampir dalam bagian akhir penelitian ini.

Interpretasi yang dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta sejarah yang dihasilkan dari verifikasi sumber sejarah sebelumnya. Interpretasi dapat dipahami sebagai suatu jalan untuk menafsirkan, menjelaskan atau memahami sesuatu. Interpretasi sejarah merupakan tahap menafsirkan, menjelaskan dan memahami peristiwa sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dihasilkan setelah melalui tahap kritik atau verifikasi sumber sejarah. Interpretasi sejarah dilakukan sebelum historiografi sejarah. Interpretasi sejarah bertujuan untuk menemukan hubungan antar fakta-fakta sejarah untuk menjelaskan peristiwa sejarah yang logis. Setiap fakta sejarah yang dihasilkan memiliki hubungan kausalitas dengan fakta sejarah lainnya. Oleh sebab itu peneliti dituntut untuk dapat memberikan interpretasi dan merangkai fakta-fakta sejarah menjadi peristiwa sejarah yang utuh.

Hasil interpretasi sejarah yang dilakukan peneliti diuraikan dan dijabarkan dalam historiografi (penulisan sejarah) yang dalam hal ini berada pada bagian pembahasan hasil penelitian. Historiografi adalah usaha untuk menuliskan peristiwa secara kronologis, logis, dan sistematis dengan menerangkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh sehingga akan dihasilkan suatu kisah yang ilmiah. Dalam penelitian ini akan dimuat historiografi tentang pola kolonisasi Pemerintah Kolonial Belanda di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan 1915-1942.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolonisasi sebagai Kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Bidang Demografi

Kolonisasi atau yang saat ini menjelma menjadi program transmigrasi merupakan sebutan bagi pelaksanaan program pemerintah Kolonial Hindia Belanda terkait dengan persoalan kependudukan dan pertanahan di Hindia Belanda pada masa itu. Kemunculan program kolonisasi ini tidak terlepas dari adanya kebijakan Politik Balasa Budi atau Politik Etis. Politik etis memuat ketentuan mengenai adanya proses mobilisasi penduduk yang dilabeli dengan tujuan pemerataan persebaran penduduk dan

pemerataan sumber daya alam. Penting diketahui bahwa dibalik tujuan demografi tersebut, termuat kepentingan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang cukup krusial. Kolonisasi dijalankan dengan tujuan membatasi dan mempersempit wilayah kekuasaan adat. Secara sederhana pemerintah Kolonial Hindia Belanda memandang bahwa kebijakan kolonisasi dapat meminimalisir adanya gerakan sosial di Jawa khususnya. Dalam buku Pemberontakan Petani Banten dapat diketahui dengan jelas bahwa situasi di politik di Pulau Jawa menunjukkan indikasi adanya pergolakan yang pada akhirnya bermuara pada aksi pemberontakan.³

Sejarah pemberontakan petani yang terjadi pada akhir abad ke 19 ini merupakan bukti bahwa gerakan sosial yang mengancam stabilitas pemerintah Kolonial Hindia Belanda lebih rentan terjadi pada wilayah yang padat penduduknya dengan tingkat ketersediaan lahan yang menipis. Berangkat dari fakta inilah dikemudian hari pada permulaan abad ke 20 pemerintah kolonial Hindia Belanda menjalankan program mobilisasi penduduk yang dikenal dengan nama kolonisasi. Kolonisasi merupakan usaha perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau disekitarnya guna mengatasi permasalahan kependudukan di Pulau Jawa. Kolonisasi di Hindia Belanda pada praktiknya secara resmi dilaksanakan melalui suatu komisi yang dikenal dengan nama *Central Commisie Voor Emigratie en Kolonisatie Van Inheemsen* (Komisi Pusat Emigrasi dan Kolonisasi Pribumi) atau yang kemudian dikenal menjadi Djawatan Transmigrasi. Melalui komisi ini pemerintah Kolonial Hindia Belanda mulai merancang mobilisasi penduduk dari pulau Jawa untuk menjawab berbagai persoalan terkait kependudukan di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Di Jawa sendiri lahan pertanian dan perkebunan semakin menyempit dikarenakan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Menurut pengumuman-pengumuman Pemerintah Hindia Belanda, tujuan dari kolonisasi yang akan diselenggarakan ini ialah untuk mengurangi kepadatan dan kelebihan penduduk pulau Jawa.⁴

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di luar Pulau Jawa dihadapkan pada kondisi dimana perkebunan besar menuntut pemenuhan tenaga kerja. Opsi perpindahan penduduk melalui kegiatan kolonisasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga

³ Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

⁴ JM Harjono, *Transmigration in Indonesia (Transmigrasi dari Kolonisasi sampai Swakarsa)*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1997), hlm. 2.

kerja di perkebunan. Fakta bahwa tenaga kerja asing lebih mahal dibandingkan dengan tenaga kerja dari Pulau Jawa secara praktis mulai menunjukkan visi lain dari diselenggarakannya kolonisasi ini. Disisilain, terdapat kondisi dimana terdapat banyak kuli kontrak yang telah berpindah ke Sumatera memutuskan kembali ke Pulau Jawa menyebabkan persoalan kependudukan dan persoalan pemenuhan kebutuhan kuli perkebunan semakin kompleks. Oleh sebab itu dalam memulai program kolonisasi diperlukan daerah baru yang mampu menjawab permasalahan tersebut.

Program kolonisasi disamping sebagai kebijakan yang dipandang menguntungkan pemerintah kolonial tentu saja dilaksanakan dengan penuh pertimbangan. Komisi Pusat Emigrasi dan Kolonisasi Pribumi merancang program ini dengan baik mulai dari pertimbangan daerah tujuan kolonisasi hingga model pelaksanaan kolonisasi. Pemilihan daerah tujuan kolonisasi mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya adalah pertimbangan faktor kepadatan penduduk di daerah tujuan kolonisasi. Pertimbangan terkait dengan ketersediaan lahan subur juga penting karena program kolonisasi yang dirancang terikat dengan kehidupan agraris. Dengan berbagai pertimbangan ini kemudian Lampung terpilih sebagai daerah tujuan kolonisasi pertama kalinya. Lampung secara geografis memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang subur. Dalam segi politik sejak abad ke 20 wilayah Lampung sendiri telah resmi berada dalam kendali pemerintah Kolonial Hindia Belanda sejak gugurnya Radin Intan II tahun 1856. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah terkait dengan sifat keterbukaan yang terdapat dalam masyarakat Lampung. Tentu saja sifat keterbukaan ini menjadi nilai lebih yang dapat menyukseskan program kolonisasi.

Kolonisasi yang dijalankan pemerintah Kolonial Belanda pada awalnya tidak secara resmi dijalankan oleh pemerintah kolonial melainkan oleh seorang direktur kolonial di Salatiga. Pada tahun 1906, A.Th. J. van Emmerik menjalankan kolonisasi dengan membuka tanah di Palu yang diberi nama *Kalawara Naputi*.⁵ Pada tahun 1907 dengan dana subsidi sebesar f 25.000 – f 30.000 Emmerik memberangkatkan beberapa kolonis⁶. Akan tetapi program kolonisasi ini tidak begitu berhasil karena dari 141 keluarga yang mengikuti kolonisasi hanya tersisa sekitar 146 jiwa saja. Kegagalan ini

⁵ *Ibid.*, hlm.62.

⁶ Merujuk pada buku transmigrasi di Indonesia kolonis digunakan untuk menyebut peserta yang terlibat dalam program kolonisasi.

akhirnya menyebabkan urusan kolonisasi sebagai bagian dari politik etis pada tahun 1915 diserahkan kepada Pemerintah Kolonial melalui lembaga *Leger des Heils*.

Pada perkembangnya program kolonisasi juga mulai diarahkan ke wilayah Sulawesi. Mapili dipilih menjadi tujuan kolonisasi selanjutnya. Baik antara Lampung dengan Mapili terpisah cukup jauh satu dengan yang lainnya. Secara kultural kedua wilayah ini tentu memiliki perbedaan yang cukup jauh. Lampung dan Mapili memainkan posisi penting dalam sejarah kolonisasi di Hindia Belanda. Analisis lebih jauh terkait dengan kedua daerah tujuan kolonisasi ini akan menimbulkan perbandingan terkait dengan kebijakan kolonisasi yang dijalankan. Temuan-temuan baru terkait dengan perbedaan dan persamaan pola kolonisasi akan dimunculkan untuk memahami lebih jauh sejarah program kolonisasi yang nantinya menjadi cikal-bakal program transmigrasi di Indonesia.

Pola Kolonisasi di Lampung

Lampung sudah dikenal orang-orang Belanda sebagai daerah yang subur sejak masa VOC. Pertumbuhan penduduk yang rendah dan kepadatan penduduk yang jarang menambah nilai bagi Lampung untuk menjadi tujuan kolonisasi yang dijalankan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Program kolonisasi di Lampung dijalankan pertama kali dengan memindahkan orang-orang Jawa dari desa Bagelen, Jawa Tengah ke Gedong Tatanan pada tahun 1905. Sejak saat ini dimulailah sejarah kolonisasi di Hindia Belanda.

H.J Heeren dalam bukunya berjudul *Transmigrasi di Indonesia* membagi pola kolonisasi menjadi dua babakan waktu menjadi periode kolonisasi sebelum perang dan periode kolonisasi setelah perang. Perang yang dimaksud disini tentu saja adalah gejala Perang Dunia yang memanas pada masa itu. Tujuan pembagian ini adalah untuk mendapatkan garis besar kebijakan kolonisasi dan menganalisis keuntungan dan kerugian dari kebijakan kolonisasi yang diterapkan. Dalam kebijakan kolonisasi yang diambil pemerintah Kolonial Belanda, lebih jauh lagi terdapat pembabakan waktu yang lebih kronologis terkait dengan kolonisasi di Lampung sebagai berikut:

1) Fase Eksperimen 1905 – 1911

Pada fase ini kebijakan transmigrasi belum diambil secara penuh oleh Djawatan Transmigrasi Pemerintah Kolonial Belanda. Artinya kebijakan

kolonisasi yang ada masih berupa percobaan kecil yang dilakukan oleh kontrolir-kontrolil setempat. Kolonisasi di Sumatera tepatnya di Lampung sendiri pada masa eksperimen ini berlangsung tahun 1905. Kolonisasi ini melibatkan sebanyak 155 kepala keluarga. Para kolonis ini dibekali pemerintah dengan premi sebesar 20 gulden masing-masing kepala keluarga. Pembiayaan juga meliputi makanan dan perumahan yang dijamin sampai satu tahun penuh. Jadi total biaya tiap keluarga ditaksir kira-kira sebesar 300 gulden, dan ini dianggap terlalu tinggi.⁷ Akhir dari fase eksperimen kolonisasi di Lampung ini adalah sebanyak 4.818 jiwa penduduk Jawa yang menetap di Lampung.

2) Periode Bank Kredit Lampung 1911 – 1929

Seiring dengan progress kolonisasi, Bank Kredit Lampung didirikan pada Bulan Maret tahun 1911. Bank Kredit Lampung ini didirikan untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah Kolonial Belanda dalam hal pemberian premi kolonisasi. Bank Kredit Lampung mempunyai tugas dan wewenang menyediakan sekitar 22,5 gulden kepada setiap kolonis. Di samping kewajiban ini, Bank Kredit Lampung juga berhak untuk memberikan pinjaman dalam bentuk kredit dengan nominal maksimal adalah 300 gulden dengan bunga sebesar 9%. Masyarakat Jawa selaku peserta kolonisasi tentu belum terbiasa dengan sistem kredit ini sehingga pada pelaksanaannya terdapat banyak kredit macet. Para kolonis tidak menggunakan pinjaman kredit untuk pengelolaan tanah di tempat kolonisasi melainkan digunakan untuk gaya hidup seperti minum-minum, berbelanja dan sebagainya.

Permasalahan lain yang mewarnai fase kolonisasi kedua ini adalah permasalahan dalam sistem seleksi kolonis. Kepala Desa pada masa ini diberikan wewenang untuk menyeleksi peserta kolonisasi. Wewenang ini kerap kali disalahgunakan oleh kepala desa untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disenangi seperti para penyakitan, orang tua dan kuli-kuli.⁸ Permasalahan kolonisasi tidak hanya datang dari para kolonis, pihak Bank Kredit Lampung membuat ulah yang memperparah kerunyaman program kolonisasi di Lampung ini. Terdapat tindak korupsi dan penggelapan uang kredit dalam tubuh birokrasi Bank Kredit Lampung. Pada tahun 1926 terjadi defisit anggaran yang cukup

⁷ JM Harjono, *op.cit.*, hlm. 11.

⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

parah sehingga di tahun 1928 bank ini akhirnya ditutup. Persoalan-persoalan semacam ini dikemudian hari akan menjadi persoalan terkait keuntungan dan kerugian dari kebijakan kolonisasi di Lampung.

3) Periode Sejak Depresi Ekonomi hingga Perang Dunia II 1930 – 1941

Mamasuki fase depresi ekonomi, mengubah arah kebijakan kolonisasi terutama dalam hal pemberian premi. Pemerintah Kolonial Belanda tidak lagi memberikan premi dalam jumlah besar seperti halnya dalam fase eksperimen. Kebijakan baru dirumuskan pemerintah untuk memulai kembali program kolonisasi. Kebijakan Bawon diterapkan untuk mendatangkan buruh panen di tanah kolonisasi. Persyaratan menjadi kolonis semakin diperketat. Akhir dari fase ketiga ini adalah tercatat sekitar 222.586 jiwa imigran Jawa yang menetap di Lampung pada tahun 1941.

Pola Kolonisasi di Mapili, Sulawesi

Penduduk Jawa yang semakin bertambah dengan tidak terkendali memaksa pemerintah Kolonial Belanda untuk terus melanjutkan program kolonisasi dengan tidak terfokus pada satu daerah tujuan. Setelah upaya kolonisasi dimulai di Sumatera, pemerintah kolonial Belanda kemudian memulai upaya kolonisasi ke arah timur tepatnya di Sulawesi. Di Pulau Sulawesi setidaknya dicanangkan enam daerah yang akan dibuka menjadi tujuan para kolonis. Salah satu daerah tersebut adalah Mapili. Mapili merupakan daerah penting dalam sejarah kolonisasi di Sulawesi. Tercatat tahun 1937 Mapili bersama dengan Paria menjadi daerah inti kolonisasi di Sulawesi.

Kolonisasi di Sulawesi Selatan telah dimulai pada masa percobaan di tahun 1906 yang berujung kegagalan. Kegagalan ini menyebabkan rencana kolonisasi di Sulawesi tertunda dan Pemerintah kolonial Belanda tetap terfokus di daerah Sumatera. Pada tahun 1919 Gubernur Sulawesi mengirimkan surat kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia. Surat ini berisi usulan pelaksanaan kolonisasi di Sulawesi yang berlokasi di Palopo dan Masamba. Gubernur mengusulkan kedua tempat tersebut dengan alasan bahwa di daerah ini akan didirikan banyak pabrik asing yang membutuhkan tenaga kerja. Namun karena kegagalan yang cukup besar dari fase kolonisasi Bank Kredit Lampung di Sumatera, usulan mengenai model kolonisasi di Sulawesi ini belum mendapat perhatian serius.

Pemerintah Kolonial Belanda baru benar-benar mempertimbangkan Sulawesi sebagai wilayah koloni ketika di tahun 1930-an jumlah penduduk di Jawa terus mengalami peningkatan. Pada sensus kependudukan yang diadakan tanggal 7-8 Oktober 1930 tercatat 60.700.000 jiwa penduduk tinggal di Pulau Jawa. Itu berarti kenaikan jumlah penduduk semakin meningkat sebesar 50.000 sampai 600.000 jiwa pertahunnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya yang hanya 60 juta jiwa.⁹ Pertambahan penduduk yang semakin cepat ini akhirnya menjadi salah satu alasan dicanangkannya kembali program kolonisasi ke Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1937 program kolonisasi di Sulawesi Selatan dimulai secara resmi, bukan lagi di fase percobaan seperti di tahun 1906. Program kolonisasi di Sulawesi ini dibagi dalam empat gelombang keberangkatan. Kolonis Gelombang pertama datang di Polewali pada 1 September 1937. Kolonis awal ini terdiri dari 115 kepala keluarga dengan total 380 jiwa. Jumlah yang jauh lebih sedikit dari target pemerintah sebesar 150 kepala keluarga. 115 kepala keluarga ini kemudian mulai mengatur pembagian tanah di daerah koloni yang diberikan. Adapaun jumlah sebesar setengah hektar sawah bau dibagi di tahun berikutnya. Lokasi pemukiman kolonis Mapili gelombang pertama ini berada di dekat Jalan Raya Polewali-Majene. Para penduduk Jawa yang baru sampai Sulawesi ini kemudian menamai kampung baru mereka dengan nama Desa Sidodadi. R. Soeparman yang tergabung dalam kelompok kolonis gelombang pertama ini diangkat menjadi Kepala Desa. Kolonis Mapili gelombang pertama ini mendapatkan kredit dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda berupa tanah pekarangan, tanah pertanian, bahan makanan, perabotan rumah tangga, alat dan bibit pertanian hingga ongkos perjalanan yang harus dibayarkan kembali di kemudian hari. Ketentuan ini merupakan misi dan beban yang harus dijalaankan oleh para kolonis di tempat baru, di samping fakta bahwa mereka akan melanjutkan hidup dengan beradaptasi terlebih dahulu di tanah yang kebudayaannya sedikit berbeda dengan tempat asal.

Dua tahun kemudian diberangkatkan kembali kolonis gelombang kedua ke Mapili. Pada tahun 1938 sejumlah 3.335 jiwa yang terhimpun dalam 710 kepala keluarga bertolak menuju Sulawesi. Kolonis gelombang kedua ini selanjutnya ditempatkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Desa Sumberejo, Campurejo dan Sidorejo. Kolonis gelombang kedua hanya mendapat kredit berupa tanah persawahan

⁹ Ina Mirawati, "Kependudukan Masa Kolonial Dalam Sumber Arsip" dalam ANRI, "ARSIP Kependudukan, Aset Terjaga Milik Negara", *Majalah Arsip* Edisi 58, 2012, hlm 17.

sebesar seperdua *bouw*, tidak lagi seperdua hektar sebagaimana kolonis gelombang pertama. Pada tahun 1939 kembali diberangkat kolonis menuju Mapili sejumlah 461 keluarga dengan total 1.862 jiwa. Kolonis gelombang ketiga ditempatkan di Labuku. Berlanjut pada tahun 1940 kolonis gelombang keempat kembali diberangkatkan menuju Mapili. Kolonis gelombang keempat ini terdiri atas 183 atau 913 jiwa. Pemberian kredit kepada kolonis gelombang ketiga dan keempat ini bernasib sama dengan kolonis gelombang kedua. Kolonisasi di Mapili dalam empat gelombang keberangkatan ini tercatat pada akhir tahun 1940 sejumlah 1.569 keluarga dengan total 5.470 jiwa mendiami desa-desa kolonisasi yang telah dibuka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Analisis Perbandingan Pola Kolonisasi di Lampung dan Mapili

Kebijakan kolonisasi yang dijalankan pemerintah Kolonial Hindia di Lampung dan di Mapili dapat dibandingkan melalui beberapa aspek sebagai berikut:

a) Perekonomian

Pola kolonisasi sebelum perang bersifat agraris bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Pada dasar pemerintah Kolonial Hindia Belanda melaksanakan program kolonisasi yang bertumpu pada pengembangan sektor pertanian dan atau perkebunan. Pemberian bantuan atau kredit diarahkan dengan tegas untuk mengembangkan sektor agraris. Kondisi di Lampung pasca kedatangan orang-orang Jawa berubah dengan cepat. Wajah bumi Lampung dipenuhi dengan lahan-lahan pertanian yang dikembangkan oleh kolonis. Saluran irigasi dibangun seiring dengan perkembangan persawahan yang semakin banyak. Adapun di Mapili para kolonis telah dibekali dengan tanah pekarangan dan tanah persawahan yang cukup luas. Para kolonis sejak kedatangannya baik dalam gelombang pertama, kedua, ketiga maupun gelombang keempat dituntut untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupan di daerah tujuan kolonisasi melalui kegiatan pertanian. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa pada kedua daerah tersebut kehidupan perekonomian selama masa kolonisasi diwarnai dengan kegiatan di sektor agraris.

Pada perkembangan yang lebih jauh perekonomian Lampung semakin menunjukkan kemajuan dengan didirikannya Bank Kredit Lampung. Bank Kredit Lampung menjadi wajah baru perbankan di Lampung. Bank Kredit

Lampung sangat erat kaitannya dengan perkembangan kolonisasi di Lampung selama era kolonial. Kehadiran Bank Kredi Lampung menambah poin bahwa kebijakan kolonisasi masih terpusat pada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjadi sentral program kolonisasi yang dijalankan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketertarikan kolonis untuk terlibat dalam kolonisasi masih sangat kurang. Model pembiayaan kolonisasi yang terpusat pada pemerintah. Fakta ini juga tercermin dalam rencana-rencana kolonisasi yang telah disusun oleh pemerintah kolonial dengan begitu matang tanpa melibatkan unsur partisipasi pribumi. Peran pribumi yang terlibat langsung dalam kegiatan kolonisasi tidak dipertimbangkan. Singkatnya kebijakan yang semacam ini tidak dapat berjalan sebagaimana rancangan awal karena di lapangan akan muncul berbagai persoalan yang erat kaitannya dengan pihak yang terlibat dalam program kolonisasi. Oleh sebab itu sangat mungkin di kemudian hari model perencanaan program kolonisasi yang masih terpusat pada peranan pemerintah kolonial menjadi salah satu faktor yang mendorong hambatan dan bahkan kegagalan program kolonisasi.

Perbedaan mencolok yang mungkin ditemukan dalam pelaksanaan kolonisasi di Lampung dan Mapili terkait dengan bidang perekonomian ini adalah tentang pembiayaan yang diberikan kepada kolonis. Bila diamati pemberian premi bagi kolonis di Lampung tentu sangatlah tinggi dibandingkan dengan yang didapatkan kolonis di Mapili. Prosedur penggantian kredit ini juga berbeda cukup jauh baik dalam hal model pembayaran dan tahun pembayaran. Perbedaan ini sangat wajar ditemukan karena pelaksanaan kolonisasi di Lampung dengan Mapili dimulai tidak dalam waktu bersamaan. Tentu saja kolonis di Lampung yang memulai lebih awal menjadi bahan percobaan pemerintah. Sedangkan bagi kolonis di Mapili kebijakan kolonisasi yang dijalankan merupakan hasil evaluasi dari kebijakan yang telah ada.

b) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting yang patut dianalisis dalam program kolonisasi yang dijalankan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Terlebih ketika kebijakan Politik Etis yang salah satunya memuat mengenai edukasi menyebabkan pendidikan menjadi penting dalam sejarah kolonisasi.

Kondisi pendidikan di Lampung pada masa kolonisasi menunjukkan indikasi perluasan akses pendidikan. Pengelenggaraan bidang pendidikan di Lampung terbuka bagi penduduk di Lampung secara keseluruhan baik bagi penduduk asli maupun bagi pendatang (kolonis). Kedatangan pendatang atau kolonis ini mengubah arah kebijakan pendidikan di Lampung. Sekolah Desa atau sekolah atas dasar prakarsa masyarakat didirikan untuk menyokong perkembangan pendidikan di Lampung selama program kolonisasi. Perluasan daerah kolonisasi di Lampung diikuti pula dengan perluasan pendirian sekolah-sekolah desa tersebut. Tercatat pada akhir tahun 1937 jumlah sekolah desa yang didirikan di Lampung adalah sekitar 42 sekolah yang tersebar secara merata di dua *Onder Afdeling*. Wajah pendidikan di wilayah Mapili menunjukkan adanya pembukaan sekolah-sekolah bagi para pendatang. Sekolah rakyat tercatat memiliki 112 murid pada tahun 1939. Di Labuku sendiri sekolah rakyat baru dibuka pada tahun 1940. Berdasarkan pada gambaran pendidikan di Lampung dan Mapili selama dijalkannya kolonisasi ini menunjukkan gambaran bahwa usaha meraih pendidikan terus dilakukan oleh para kolonis meskipun berada di tempat yang baru.

c) Sosial-budaya

Dalam bidang sosial-budaya akan coba dianalisis bentuk pertemuan budaya masyarakat pendatang (kolonis) dengan penduduk Asli. Pada tahun 1905 kepadatan penduduk di Lampung hanya 5 jiwa per kilometer. Ketika kolonisasi mulai dijalankan nampak bahwa kepadatan di Lampung naik menjadi sebesar 12 jiwa per km persegi pada tahun 1930. Pertambahan penduduk ini tentu mengakibatkan adanya sebutan orang-orang Jawa dan orang-orang Lampung dalam keseharian masyarakat di daerah kolonisasi. Penyebutan ini timbul karena penduduk yang ada di Lampung didominasi oleh penduduk asli dan penduduk pendatang yang bersuku Jawa. Penduduk suku Jawa membentuk komunitas tersendiri dan mengembangkan kebudayaannya di daerah kolonisasi. Adanya pemisahan permukiman antara penduduk Jawa dengan penduduk asli Lampung dinilai membentuk masyarakat yang terkotak-kotak dan tidak sesuai dengan tujuan kolonisasi.

Kolonisasi sejatinya bertujuan memindahkan penduduk untuk dapat menetap di daerah tujuan tanpa ada keinginan untuk kembali ke daerah asal yang padat penduduknya. Namun, dengan pemisahan pemukiman penduduk ini masyarakat di Jawa tidak dapat berbaur sebagaimana mestinya di lingkungan baru. Pada akhirnya nanti kondisi seperti ini akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemunculan potensi konflik di daerah Lampung. Memang pada masa pemerintah Kolonial Hindia Belanda bersama dengan program kolonisasi konflik masih belum muncul karena fakta bahwa penduduk terpisah cukup jauh dan lahan yang masih dapat menampung kebutuhan penduduk. Tidak ada persoalan pertanahan yang dapat menyulut adanya konflik karena luas wilayah yang tersedia masih cukup banyak untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing penduduk dari dua suku yang berbeda tersebut.

Bidang sosial-budaya di Mapili menunjukkan wajah yang berbeda. Tidak ada yang mendominasi wilayah Mapili sebagaimana dominasi orang-orang Jawa dan orang-orang Lampung. Hal ini dikarenakan di Mapili jauh sebelum kolonisasi Jawa didatangkan, telah ditempatkan transmigrasi lokal dari etnik Bugis Sidenreng, Rappang, Teteaji, Batubatu, Soppeng, WetteE, dan Enrekang. Keragaman yang coba dibangun oleh pemerintah kolonial ini menyebabkan berkembangnya interaksi yang cukup baik antar penduduk di Mapili. Kembali lagi perbedaan situasi sosial-budaya antara Mapili dengan Lampung disebabkan oleh perbedaan waktu dimulainya kolonisasi. Lampung memulai dalam tahap percobaan sedangkan Mapili merupakan hasil perbaikan dari kebijakan percobaan tersebut.

KESIMPULAN

Kebijakan kolonisasi yang dijalankan di Lampung dan Mapili memiliki persamaan dalam bidang ekonomi agraris. Tidak ada perbedaan yang berarti mengenai kegiatan perekonomian masyarakat kolonis di Lampung dan Mapili. Hanya saja anggaran pembiayaan yang diberikan pemerintah kolonial pada kedua daerah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan pembiayaan ini berkaitan dengan hasil evaluasi pemerintah kolonial Hindia Belanda terkait dengan program kolonisasi yang

dimulai lebih dulu. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa program kolonisasi yang dijalankan di Lampung dan Mapili saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

SARAN

Kajian sejarah transmigrasi era kolonial menjadi penting untuk mengetahui benturan budaya dan juga keberagaman yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Kajian tentang Pola Kolonisasi Pemerintah Kolonial di Lampung dan Mapili 1905-1942 ini hanya menggambarkan tentang perbandingan kebijakan kolonisasi atau transmigrasi. Oleh sebab itu diperlukan penelitian lebih lanjut, terutama terkait benturan dan pertemuan budaya yang terjadi dalam masyarakat yang terlibat selama program kolonisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

Laporan Residen Kedu, Ter Meulen tentang Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa. *ANRI, Arsip Kommissorial tgl 22 Februari 1933 No. 5707.*

Berita tentang berjalannya kolonisasi Lampung pada sekitar periode Bank Kredit Lampung. *De Locomotied, 6 Maret 1925.* Diakses melalui *delpher.nl*.

Penggalan berita tentang banjir di Celebes merusak pemukiman kolonis di Mapili. *De Locomotief, 26 November 1938,* diakses melalui *delpher.nl*.

Sumber Buku/Jurnal

Aan Budianto. (2020). “Keeanga Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950an”. *Jurnal Candi*, 20(1), 18-31.

Chaerul Mundzir dkk. (2021). “Kebijakan Imigrasi Zaman Hindia Belanda (1913-1942)”. *Jurnal Rihlah*, 9 (1), 1-12.

Dahlan, Halwi. (2014). “Perpindahan Penduduk dalam Tiga Masa: Kolonisasi, Kokuming Gakari, dan Transmigrasi di Provinsi Lampung (1905 – 1979). *Patanjala*, 6 (3), 335 – 348.

Garraghan, G. J. 1957. *A Guide to Historical Methode*. New York: Fordham University Press.

Hardjono, J.M. 1997. *Transmigration in Indonesia (Transmigrasi dari Kolonisasi sampai Swakarsa)*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Heeren, H.J. 1979. *Transmigrasi di Indonesia (Transmigratie in Indonesie interne migratie en de verhouding van immigraten/ autochtonen special met betrekking*

- tot suild- en Midden Sumatra, Meppel J.A. Boom en Zoon, 1967*). Jakarta: PT Gramedia.
- Ina Mirawati. 2012. “Kependudukan Masa Kolonial Dalam Sumber Arsip” dalam ANRI, “ARSIP Kependudukan, Aset Terjaga Milik Negara”. *Majalah Arsip* Edisi 58.
- Karsiwan, dan Lisa Retono Sari. (2021). “Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung”. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 6 (1).
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Majdid, Dien dan Johan Wayudi. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, Depok: Pramedia Group.
- Muhammad, Amir. 2020. “Wonomulyo: Dari Kolonisasi Ke Transmigrasi 1937 – 1952”, *Pangadereng*, 6(1), 13 – 30.
- Sayogyo. 1986. “Transmigrasi di Indonesia 1905-1985: Apa yang Kita Cari Bersama?” dalam Sri Edi Swasono dan Masri Singaribuan. *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-985*. Jakarta: UI Press.
- Waskito, Rukamadi, dkk. 1995. *Transmigrasi: Dari Daerah Asal sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.